



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
PERATURAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 40 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 42 TAHUN
2019

TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
YAHUKIMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : bahwa Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 42 Tahun 2019 pada pasal 2 terdapat penambahan beberapa perizinan yang belum diatur sehingga perlu adanya perubahan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2909);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan tata cara permohonan Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PEnyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.

Memperhatikan : Surat dari Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 570/35/DPMPTSP/2022 perihal usulan perubahan Perbup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN YAHUKIMO

Pasal 1

Dalam ketentuan pasal 2 ditambahkan 4(Empat) jenis Perizinan yang sebelumnya 60 menjadi 64 sehingga ketentuan pasal 2 menjadi:

1. Izin Usaha Industri
2. Izin Cafe
3. Izin Hiburan)
4. Izin Pangkas Rambut
5. Izin Pendirian Taman Permainan
6. Izin Reklame
7. Izin Operasional Salon
8. Izin Rumah Makan
9. Izin Tanda pendaftaran Waralaba (STPW)
10. Izin Travel
11. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
12. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
13. Surat Izin Usaha Konstruksi (SIUJK)
14. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
15. Tanda Daftar Gudang (TDG)
16. Tanda Daftra Industri (TDI)
17. Izin Usahan Biro Perjalanan Wisata
18. Izin Kepariwisataaan
19. Izin Restoran
20. Izin Usaha Warung makan
21. Izin Izin Apotek
22. Izin Praktek Apoteker
23. Izin Kerja Perawat)
24. Izin Kerja Bidan
25. Izin Kerja peraawat Anastesi
26. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
27. Izin Kerja Praktek Dokter Umum
28. Izin Kerja Praktek Dokter Spesialis
29. Izin Kerja Protek Dokter Gigi
30. Izin Praktek Perawat
31. Izin Rekam Mesdis
32. Izin Tenaga Teknis Laboratoriu,
33. Izin Praktek Bidan
34. Izin Kerja Ortometris

35. Izin Kerja Radiografer)
36. Izin Kerja Refrasiologi Optisien
37. Izin Operasional Klinik
38. Izin Operasional Laborium
39. Izin operasional Puskesmas)
40. Izin Operasional Rumah Sakit
41. Izin Operasional Balai Pengobatan
42. Izin Operasional Optikal
43. Izin Toko Obat
44. Izin Laik Sehat
45. Izin Depot Air Minum)
46. Izin Operasional Sekolah
47. Izin Kursus dan Pendidikan
48. Izin Lembaga Latihan Swasta
49. Izin Operasional PAUD dan PKBM
50. Izin Pengendalian Menara dan Tower)
51. Izin Hotel
52. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
53. Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM)
54. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal (IPPPM)
55. Merger
56. Izin PIRT
57. Keterangan Penyimpanan Barang
58. Penimbunan Barang
59. Izin Lokasi
60. Izin Fisioterapi
61. Izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun(B3)
62. Izin operasional instalasi pengelolaan limbah (IPAL)
63. Izin Operasional Incenerator
64. Izin lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 08 Juni 2022

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 08 Juni 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

DIDIMUS YAHULI

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 40

